

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa Hak atas tanah ulayat anatar masyarakat adat dengan Pemerintah Kabupaten Sorong yang muncul akibat pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan rumah kapling tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Penelitian ini mengkaji: (1) alasan terjadinya sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan pemerintah ; dan (2) alasan Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan gugatan sebagian, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima. Sifat Penelitian adalah deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik studi kepustakaan/dokumen dan juga Analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi karena penggugat telah menguasai lahan sejak 1980 secara nyata, namun tanah tersebut kemudian digunakan untuk pembangunan rumah kapling guna transmigrasi tanpa ganti rugi. Pengadilan tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Sebagian karena penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti, keabsahan tanah, dan penguasaan fisik. Sebaliknya, Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung dalam kasasi membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam dokumen gugatan. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara legalitas administratif dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Ulayat, Putusan Hakim

ABSTRACT

This study was motivated by a dispute over customary land rights between indigenous peoples and the Sorong Regency Government, which arose due to the use of customary land for the construction of housing plots without the knowledge of the indigenous peoples. This study examines: (1) the reasons for the land ownership dispute between the community and the government; and (2) the reasons why the District Court decided to grant part of the lawsuit, while the High Court and the Supreme Court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible. The nature of the research is descriptive, and the research method used is normative. The variables used in this study are independent and dependent variables. The data sources used in this study are secondary data, which consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this study are literature/document study and data analysis. The results of the study show that the dispute arose because the plaintiff had been in actual possession of the land since 1980, but the land was later used for the construction of housing plots for transmigration without compensation. The court of first instance decided to grant the lawsuit in part because the plaintiff successfully proved the arguments of the lawsuit through evidence, the validity of the land, and physical possession. Conversely, the appellate court and the Supreme Court in cassation overturned the previous decision and declared the lawsuit inadmissible due to formal defects in the lawsuit documents. This study emphasizes the importance of harmonizing administrative legality and social justice.

Keywords: Land Dispute, Customary Land, Judicial Decision